



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BONE**

2021

LKJiP



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BONE**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2021 merupakan wujud Akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahunan yang dipertegas melalui Perjanjian Kinerja 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Dinas Perikanan pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan kepada stakeholder mengenai

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Bone disusun sesuai Amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja.

Dinas Perikanan Kabupaten Bone akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, diharapkan dimasa yang akan datang sasaran strategis dapat lebih optimal, sehingga dapat mendukung capaian visi misi sebagai Bone yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera (MABESSA)

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perikanan selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja tahun depan secara lebih produktif, efektif dan efisien.



W. mpono 14 Februari 2022

Dinas

H. RAHMAN UDDIN, M.Si

Pengkat Pembina Utama Muda

NIP.19631231198903 1 175

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	5
A. Umum	5
B. Organisasi	7
C. Isu Strategis	12
D. Aspek Strategis	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
A. Tujuan Sasaran	15
B. Strategi dan Arah Kebijakan	16
C. Indikator Kinerja Utama	18
D. Perjanjian kinerja	19
E. Standar Penilaian kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Upaya Perbaikan Pada Perencanaan Berikutnya	43
C. Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	48

DAFTAR GAMBAR

No.	Halaman
1. Struktur Organisasi	11
2. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	12
3. Produksi Perikanan Tahun 2020-2021	32
4. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2021	33
5. Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020-2021	34



BAB I

PENDAHULUAN

A.UMUM

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun Tahun 2014, Tentang Juknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan melaporkan pelaksanaan Akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan laporan Kinerja paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lemvbaran Negara republic Indonesuia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Salah satu dari Pasal 3 Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 yakni asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berupa laporan kinerja instansi pemerintah laporan tersebut harus memberikan gambaran yang luas seobjektif mungkin mengenai tingkat pencapaian kinerja, sasaran, program, kegiatan dan indikator baik keberhasilan maupun aspek ketidakberhasilan kinerja yang telah dicapai pada periode tertentu.

Sejalan dengan makna Good Governance dimaksud, kebijakan umum pemerintah diarahakan untuk mendorong mewujudkan pemerintahan yang baik, terpercaya, serta berorientasi pada hasil (outcome). Untuk mencapai sasaran yang dimaksud dikembangkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur yang diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan yang berbasis kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam proses pelaksanaan program kegiatan Dinas Perikanan, Negara dalam keadaan darurat dengan adanya pandemi covid 19 sehingga dilakukan refocusing anggaran sebagaimana yang diamanatkan oleh instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran serta pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid19), sehingga hal ini

mengakibatkan adanya indikator kinerja yang pencapaiannya tidak maksimal.

Dinas Perikanan Kabupaten Bone sebagai Instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Bone. Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 merupakan perwujudan kewajiban Dinas Perikanan kabupaten Bone untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana startegis (Renstra) yang disusun pada tahun 2018- 2023

B. ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan berubah nomenklatur menjadi Dinas Perikanan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Kabupaten / Kota untuk urusan bidang kelautan dan perikanan. Dinas Perikanan sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang perikanan;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bone kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang Perikanan daerah sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan di wilayah Kabupaten ,pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan penerbitan siup dibidang pembudidayaan ikan di wilayah Kabupaten , pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan di wilayah Kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI);dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang Perikanan ;dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bone sesuai Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2021 sebagaimana disebutkan diatas dapat diakses melalui QR Code berikut ini:



Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bone dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini



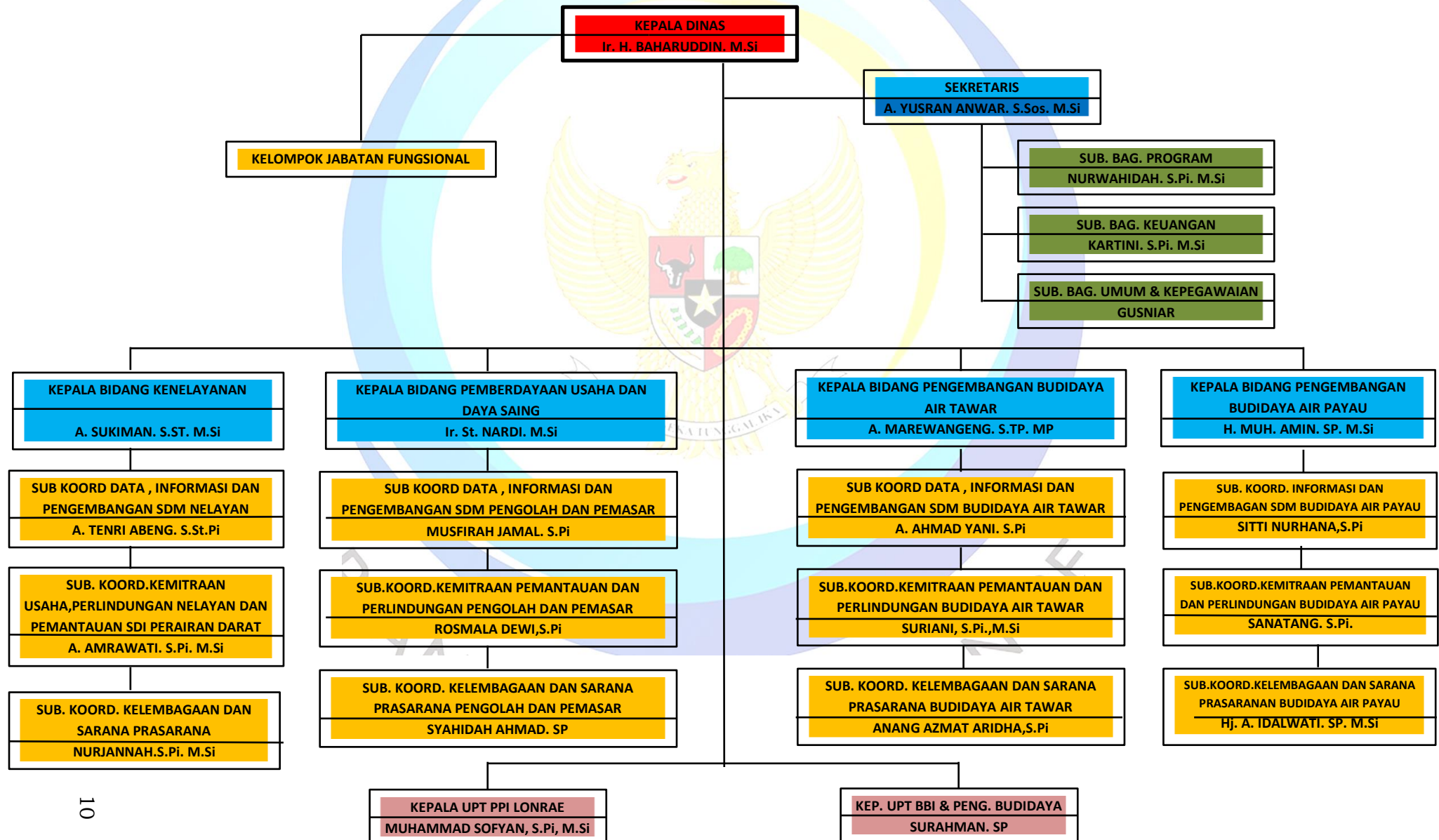
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021

Peraturan Bupati Bone No.87 Tahun 2021

Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Perikanan

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bone



Kondisi Kepegawaian

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bone, saat ini didukung oleh :

a. Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Umur

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2021 (ASN) tercatat sebanyak 49 orang dan NON ASN tercatat 36 orang , dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah Dasar (SD) sampai Magister Sains (S2).



SD: - Orang



SMP: 1 Orang



SMA: 25 Orang



Diploma : 8 Orang



S1:34 Orang



S2: 17 Orang

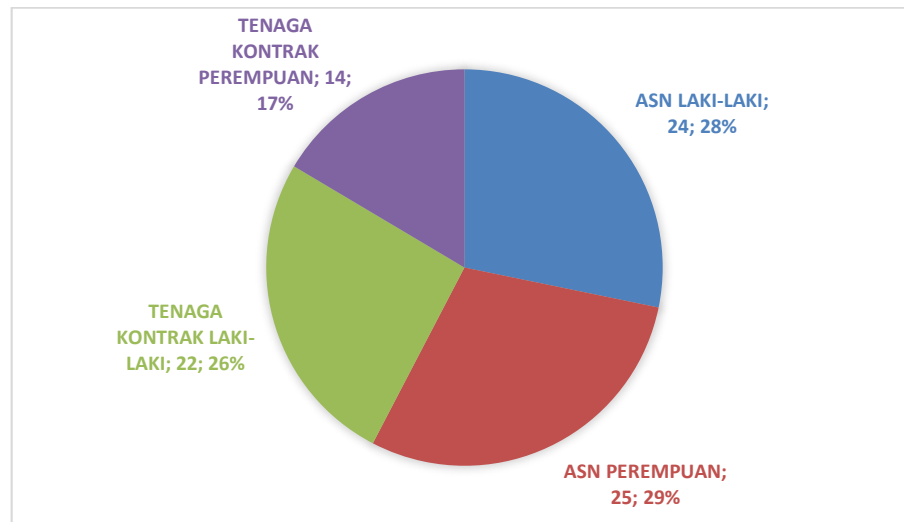


ASN: 49 Orang



Tenaga Kontrak: 36 Orang

Gambar 2. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin



C. ISU STRATEGIS

Dalam penentuan isu-isu strategis, maka faktor-faktor pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kab Bone ditinjau dari permasalahan pembangunan Daerah yaitu ;

1. Produktivitas dan daya saing produksi makanan masih rendah.
2. Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing
3. Masih lemahnya manajemen Pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang
4. Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah serta kesenjangan gender dalam kelembagaan kelompok
5. Sebagian besar operasional usaha nelayan skala kecil bergantung pada ponggawa sawi.
6. Masih maraknya kegiatan illegal Fising

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Strategis merupakan suatu pola tujuan kebijakan program kegiatan keputusan maupun pengalokasian sumberdaya yang memerlukan pemahaman tentang organisasi. Dinas Perikanan dalam mendukung RPJMD 2018-2023 terkait dalam Misi 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan usaha peningkatan kualitas dan kuantitas Dokumen perencanaan perangkat daerah melalui pemenuhan layanan serta sarana prasarana pendukung pelayanan administrasi perkantoran dan misi ke 2 yaitu mengembangkan kemandirian Ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja organisasi melalui strategi peningkatan kualitas SDM Nelayan, Pembudidaya, pengolah dan pemasar, kapasitas kelembagaan kelompok dan pola kemitraan melalui pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan. Sasaran pembangunan perikanan dalam mencapai visi dan misi yaitu:

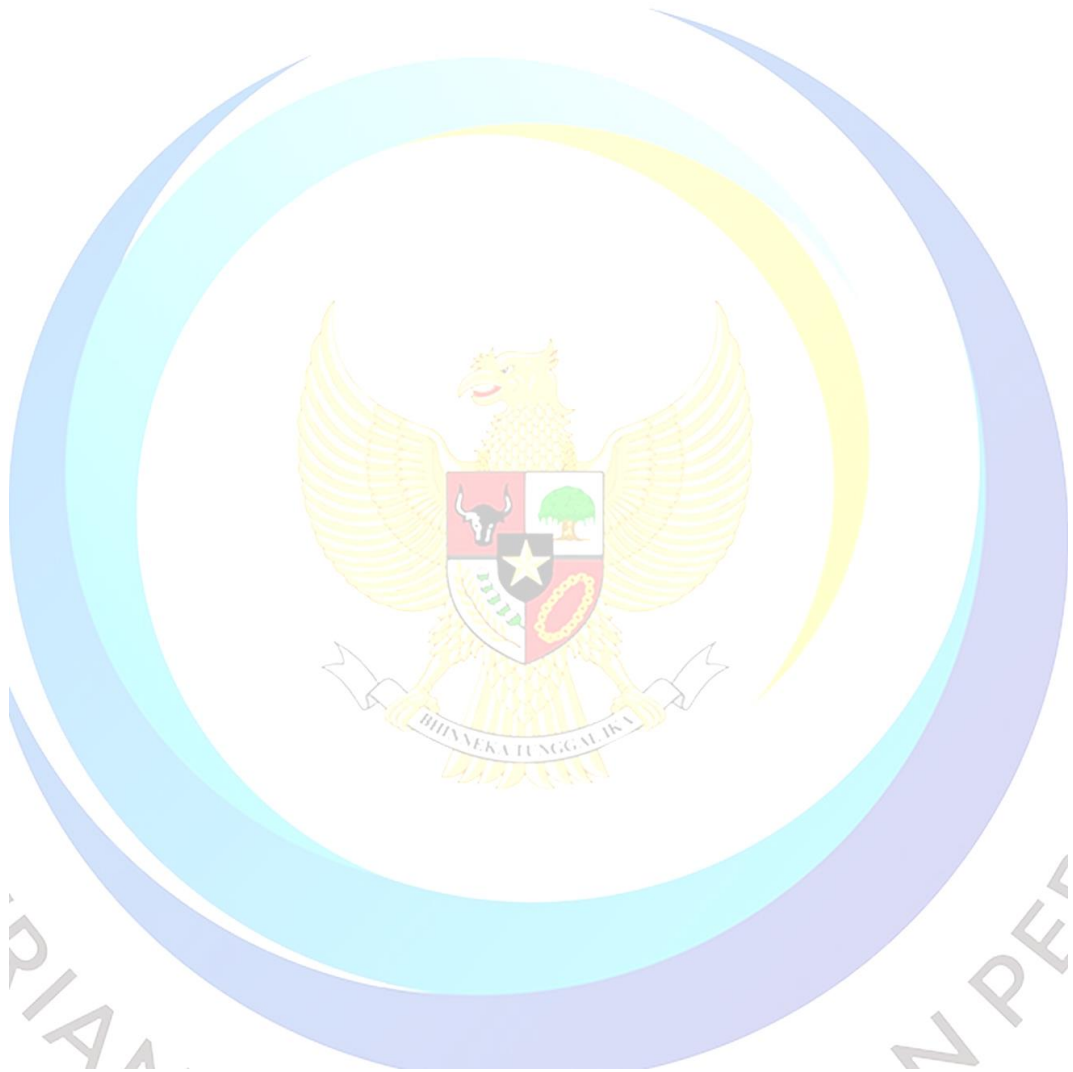
1. Meningkatnya Produksi Perikanan .

Pembangunan yang terkandung dalam RPJMD Dinas perikanan yaitu meningkatnya Produksi Perikanan dengan sasaran utama pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan , baik Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah dan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja urusan Kelautan dan Perikanan.

Dinas Perikanan Kabupaten Bone selaku perangkat daerah yang mempunyai mandat urusan Kelautan dan Perikanan menjadi kewenangan Kabupaten / kota memiliki tanggung jawab yang

besar untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bone pada sektor Kekautan dan Perikanan, salah satu pilar pemerintahan yang baik (Good governance) adalah Akuntabilitas.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A.Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2018-2023 Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone. Renstra Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 menjadi dasar Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Rencana Kerja Jangka Pendek (RKPD) Kabupaten Bone, seperti pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan 2018 - 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
		TUJUAN/SASARAN	2020 (Baseline Data)	2021	2022	2023	2023
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Pertumbuhan PDRB sub sektor Perikanan (%)	-	-	10	10	10
	Meningkatnya Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	6	6	6	6	6
		Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)	7	7	7	7	7
		Pertumbuhan Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	-	-	2	2	2
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan	Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP (Inspektorat Daerah)	B	B	B	B	BB

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan kelautan dan Perikanan	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100
--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber Data. Renstra Perubahan 2018-2023 Dinas Perikanan Kab Bone

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan Dinas Perikanan 2018-2023 Kabupaten Bone dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bone dengan Visi : Masyarakat Bone yang Berdaya Mandiri berdaya saing dan Sejahtera (MABESSA).Dinas Perikanan mendukung pada misi 1 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik ,bersih dan Bebas Korupsi Kolusui dan Nepotisme (KKN)

1.Strategi

Adapun Strategi Dinas Perikanan mengarah kepada peningkatan kualitas dan kuantitas Dokumen perencanaan dengan penganggaran Perangkat daerah melalui pemenuhan layanan serta sarana dan Prasarana pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Sedangkan misi ke 2.Mengembangkan kemandirian ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat

Dalam misi ke 2 strategi Dinas Perikanan mengarah kepada Peningkatan kesejahteraan Nelayan,Pembudidaya Ikan ,Pengolah dan Pemasar, Kapasitas kelembagaan dan Pola kemitraan pelaku Usaha Perikanan melalui pengembangan sarana dan prasarana Usaha Perikanan.

2.Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Dinas perikanan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan,seperti pada tabel dibawah sebagai berikut

Tabel.2. 2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
Misi 2 : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan Meningkatkan Produksi Perikanan	Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan	Strategi Peningkatan kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan, Pengolah dan Pemasar, kapasitas kelembagaan kelompok dan pola kemitraan pelaku usaha perikanan melalui pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan	Arah Kebijakan Penyajian Data dan Informasi sektor Perikanan serta Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi pelaku usaha perikanan
			Arah Kebijakan Peningkatan sarana dan prasarana usaha penangkapan, pembudidayaan ikan dan Pengolah pemasar
			Arah Kebijakan Penguatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan
			Arah Kebijakan Penguatan dan fasilitasi pelaku usaha perikanan dalam mengakses permodalan dan Perlindungan diri
			Arah Kebijakan Peningkatan pelayanan UPT TPI dan UPT BBIPB

Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
--------	---------	----------	----------------

Tujuan Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan	Sasaran <i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan</i>	Strategi <i>Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah melalui pemenuhan layanan serta sarana dan prasarana pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Arah Kebijakan <i>Memberikan Kecakupan Pemenuhan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air untuk mendukung admintrasi perkantoran</i>
			Arah Kebijakan <i>Melakukan kecukupan bahan, jasa dan alat kelengkapan perkantoran</i>
			Arah Kebijakan <i>Melakukan pelayanan admintrasi keuangan dan perkantoran yang transparansi dan akuntabel</i>
			Arah Kebijakan <i>Mendorong pengadaan Mutu Sarana dan Prasarana Pendukung Perkantoran</i>
			Arah Kebijakan <i>Mendorong kemampuan sumber daya manusia aparatur</i>
			Arah Kebijakan <i>Memberikan informasi kinerja SMART</i>
			Arah Kebijakan <i>Melakukan Penyusunan Perencanaan, Publikasi penyelenggaraan OPD dan Promosi Produk Perikanan</i>

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja utama (IKU) adalah ukuran atau indikator Kinerja suatu instansi utamanya mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Tujuan menetapkan IKU Dinas Perikanan Kab Bone adalah untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih setiap tahun anggaran dan untuk mendapatkan informasi penting terkait kinerja ASN yang nantinya bisa dijadikan pedoman/acuan dalam Menyusun manajemen kerja

Indikator Kinerja Utama Dinas perikanan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone

Tabel.2.3 . Indikator Kinerja Utama Dinas perikanan Kab Bone

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
		TUJUAN/SASARAN	2020 Baseline Data	2021	2022	2023	2023
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Pertumbuhan PDRB sub sektor Perikanan (%)	-	-	10	10	10
	Meningkatnya Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	6	6	6	6	6
		Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)	7	7	7	7	7
		Pertumbuhan Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	-	-	2	2	2
2	Meningkatan akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan	Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP (Inspektorat Daerah)	B	B	B	B	BB
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Perikanan	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)	10	100	100	100	100

Sumber Data : Renstra Perubahan 2018-2023 Dinas Perikanan Kab Bone

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen pernyataan kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja serta program dan anggaran penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2021 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra Perubahan , Renja 2021, IKU dan APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone adalah menetapkan PK 2021 sebagai berikut:

Tabel.2. 4 . Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya produksi perikanan	- Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.116.958.450
		- Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)	7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.291.029.050
		- Pertumbuhan Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	-	-	-
2.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan	- Persentase Capaian Program Perangkat Daerah (%)		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	5.610.526.679

J U M L A H	9.018.514.1879
--------------------	-----------------------

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bone, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 5. Standar Penilaian Kinerja

Nilai	Pencapaian
110 ke atas	sangat tercapai/sangat berhasil
90 < X 110	Tercapai/Berhasil
60 < X 90	Cukup tercapai/cukup berhasil
X < 60	Tidak Tercapai/tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah ;

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100 \%$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Perikanan menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Perikanan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. capaian indikator kinerja sasaran atas perjanjian kinerja mengacu kepada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kab Bone.

Sasaran 1. Meningkatnya Produksi Perikanan

Indikator 1.1. Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap

Indikator 1.2. Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya

Indikator 1.3. Pertumbuhan Produksi Olahan Hasil Perikanan

Sasaran 2 .Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja urusan

Kelautan dan Perikanan

Indikator 2.1 : Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah

1.Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021

Capaian kinerja Tahun Anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasi tahun 2021, sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut ;

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
Meningkatnya Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	6	10,4	173	Melampaui Target
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)	7	14,3	204	Melampaui Target
	Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan Perikanan (%)	-	-	-	-
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Urusan Kelaitan dan Perikanan	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat daerah	100	100	100	Tercapai/ber/berhasil
Rata- rata				159	Melampaui Target

Sumber Data : Olah Data dan Renstra Perubahan 2018-2023 Dinas perikanan Kab Bone

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa rata-rata Capaian Indikator sasaran kinerja Dinas Perikanan Kab Bone pada Tahun 2021 dengan nilai **159 %** melampaui target atau pencapaiannya **sangat tercapai atau sangat berhasil**. Tetapi jika dilihat dari nilai realisasi secara per indikator tercatat pencapaian penilaian **tercapai atau berhasil**.

Meningkatnya produksi Perikanan dengan indikator pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dari target sebesar 6% dengan realisasi produksi tahun 2020 yaitu 49.604,29 ton dan realisasi tahun 2021 sebanyak 54.770.537 ton atau mengalami pertumbuhan 10,4%, sedangkan Realisasi kenaikan 4,16 % dengan taget produksi 52.580,73 dan realisasi 54.770.537 tahun 2021

sedangkan **Indikator Pertumbuhan Perikanan Budidaya**, Target 7% dengan realisasi produksi untuk perikanan budidaya tahun 2020 sebesar 393.668,61 ton dan realisasi produksi tahun 2021 sebesar 450.180,99 ton atau mengalami pertumbuha sebesar 14,3% dimana realisasi tahun 2021 450.180,99 dari target 421.225,41 sehingga mengalami kenaikan 6,9% tahun 2021 .

Indikator pertumbuhan produksi hasil olahan perikanan datanya belum kami sajikan karena pada tahun 2021 belum menjadi kewenangan Kabupaten tetapi mengikuti adanya perubahan IKU di renstra perubahan dan akan digunakan pada

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021

tahun 2022 sebagai salah satu indikator dari sasaran meningkatnya produksi perikanan.

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan dengan Indikator persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dengan target 100 % realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Pencapaian program urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /Kota didukung oleh beberapa kegiatan dengan indikator Persentase Capaian perangkat daerah dengan realisasi kinerja 100 % tahun 2021.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018- 2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan 2018- 2023. Adapun angka realisasi dan capaian kinerja Dinas Perikanan apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut :

Tabel 3. 2 . Realisasi Kinerja Tahun 2018 – 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	46.746,90										
Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	2	1,4	1,002	-	-	-	140	100,21	-	-	-
	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap		1,1	1,22				101,7	101,7			
	Pertumbuhan	6			10,4	-	-			173		-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021

	Produksi Perikanan Tangkap (%)											
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	356.896,70										
	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	4	1,6	1,0002	-	-	-	160	1,002	-	-	-
	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya		1	1,22				100	101,7			
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)	7		-	14,3	-	-	-		204	-	-
	Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan Perikanan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	-	B	B	BB							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja urusan Kelautan dan Perikanan	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat daerah	100	100	100	100			100	100	100		

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 Dinas Perikanan Kab Bone dan Hasil LHE Inspektorat Kab Bone

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja Tahun 2018-2023 terdapat 3 kali perubahan indikator yaitu

- Tahun 2018 yaitu:

Sasaran1 : Meningkatkan Produksi Perikanan

Indikator 1 Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

2.Produksi perikanan budidaya (Ton)

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kelautan dan perikanan

Indikator 1.Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP.

- Tahun 2019

Sasaran 1. Meningkatkan produksi perikanan

Indikator 1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)

Indikator 1.2 Persentase Peningkatan Nilai Poduksi Perikanan Tangkap (%)

Indikator 2.Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Indikator 2.1. Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya (%)

Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitass kinerja urusan kelautan dan perikanan

Indikator 1. predikat Evaluasi SAKIP ,oleh APIP

- Tahun 2020 - 2023 yaitu:

Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Perikanan

Indikator: 1.Pertumbuhan Produksi Perikanan tangkap (%)

2. Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)

3. Produksi Hasil Olahan Perikanan (%)

Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator 1. Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat daerah

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Realisasi Kinerja yang mengacu pada target jangka menengah Renstra. Realisasi kinerja yang akan dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Bone 2018-2023 merupakan penyelenggaraan bidang urusan sektor Kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bone sebagai Komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran RPJMD Kabupaten Bone.

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka menengah Renstra 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	3	1,4	1,0021	-	-	-
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	6	-	-	10,4	-	-
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5	1,6	1,002	-	-	-
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)	7	-	-	14,3	-	-
	Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan perikanan(%)	-	-	-	-	-	-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021

Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	Persentase Capaian Kinetja Program Perangkat daerah (%)	100	100	100	100	-	-
--	---	-----	-----	-----	-----	---	---

Sumber Data .Olah Data dan Renstra _Perubahan tahun 2018-2023

Berdasarkan Tabel tersebut diatas perbandingan realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya produksi perikanan terjadi perubahan indikator kinerja, dimana tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya mengalami kenaikan yang bervariasi, pertumbuhan produksi sangat signifikan dan melampaui dari target yang sudah ditentukan, baik pertumbuhan produksi perikanan tangkap maupun pertumbuhan produksi perikanan budidaya.

Sasaran meningkatnya produksi perikanan tahun 2019 dengan indikator persentase kenaikan produksi perikanan tangkap dan persentase kenaikan produksi perikanan budidaya realisasi kenaikan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel tersebut diatas.

Perbandingan realisasi kinerja meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan Kelautan dan Perikanan dengan **indikator persentase capaian kinerja program perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100 %**

4.Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Tabel 3.4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Standar Nasional	
			Target 2021	Realisasi 2021
Meningkatnya Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	10,4	-	-
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)	14,3	-	-
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja urusan Kelautan	Persentase Capaian Program Perangkat Daerah (%)	100	-	-

Sumber. Data Olah Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Dinas Perikanan tidak dapat disandingkan dengan standar pelayanan minimal/standar nasional lainnya ,karena Dinas Perikanan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM atau pun standar Nasional lainnya

5. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan Indikator Kinerja dalam rangka pencapaian tujuan / sasaran strategis dapat dilihat pada ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5. Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja Sebagai Berikut:

Sasaran	Indikator	%		Predikat
---------	-----------	---	--	----------

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021

Strategis	Kinerja	Capaian	Rata-rata Capaian	>110	$90 \leq s/d < 110$	$60 \leq s/d < 90$	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup	Tidak Berhasil
Meningkatnya Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	10,4	173	✓			
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)	14,35	204	✓			
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat daerah	100	100		✓		

Sumber . Olah Data dan Perubahan Renstra 2018-2023

Berdasarkan data pada tabel 3.5 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis Dinas perikanan Tahun 2021 pada indikator pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan pertumbuhan produksi perikanan budidaya masuk dalam kategori **sangat berhasil** namun pada indikator persentase capaian program kinerja perangkat daerah masuk dalam kategori **berhasil**

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Starategis 1. Meningkatkan Produksi Perikanan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan sasaran strategis Dinas Perikanan Kab Bone Tahun 2021 dengan predikat berhasil dimana indikator capaian kinerja pertumbuhan produksi perikanan

tangkap sebesar 10,4 % . Dinas Perikanan dalam kategori **tercapai/berhasil**, yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 104,2% dengan demikian indikator dapat mencapai target kinerja yang diperjanjikan .

Gambar 3. Produksi Perikanan Tahun 2020-2021



Sumber Data: Laporan Tahunan Dinas Perikanan 2021

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator 1.1 Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap

Defenisi : Pertumbuhan produksi perikanan tangkap merupakan indikator yang sangat **tercapai atau sangat berhasil**.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan yaitu :

1. Beberapa kegiatan sebagai penunjang sasaran strategis yaitu program kegiatan pendampingan nelayan sebagai salah satu upaya yang dilakukan melalui pembinaan ,peningkatan SDM bagi nelayan, dalam hal mendapatkan fasilitasi Asuransi Nelayan,pendistribusian konversi BBM ke BBG dan fasilitasi

nelayan dalam hal sertifikat tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

2. Adanya pemberian bantuan alat tangkap ramah lingkungan kepada kelompok nelayan (KUB)
3. Adanya bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Gambar 4. Produksi Perikanan Tangkap 2020-2021



Sumber Data: Laporan Tahunan Dinas Perikanan Tahun 2021

Pencapaian diatas telah melampaui target namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya yaitu :

1. Perubahan pola pikir nelayan untuk membuat ijin usaha masih sangat rendah
2. belum ada sanksi yang membuat efek jera bagi para pelaku usaha nelayan ketika tidak memiliki ijin usaha (Pencatatan Kapal).
3. pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan nelayan belum maksimal.

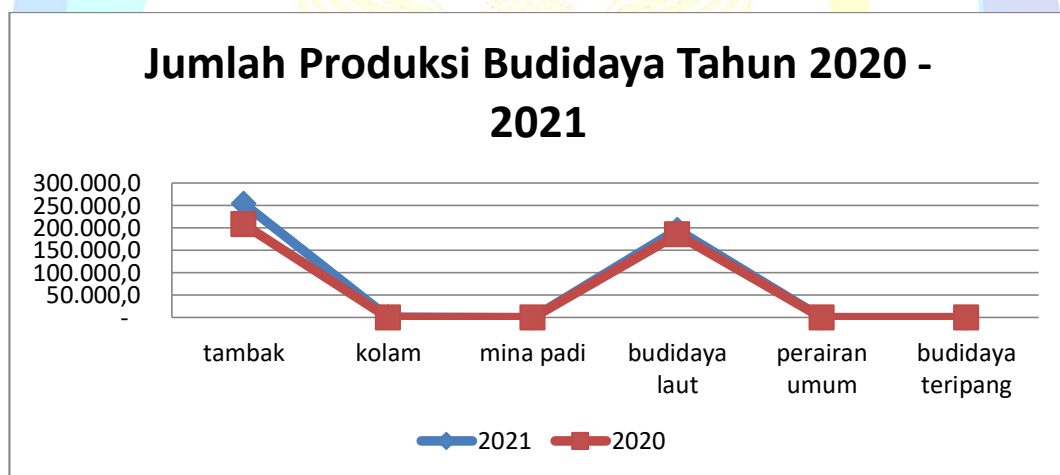
Upayah yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dalam pencapaian kinerja adalah

1. mengintensifkan kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran nelayan untuk memiliki izin usaha
2. diperlukan regulasi mengenai sanksi yang tidak memiliki izin usaha perikanan..

Indikator 2. Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya

Defenisi: .Pertumbuhan produksi perikanan budidaya berada dalam kategori sangat **tercapai atau sangat berhasil**.

Gambar 5. Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020-2021



Sumber Data: Laporan Tahunan Dinas Perikanan Tahun 2021

Pencapaian diatas telah melampaui target, ada beberapa keberhasilan kegiatan penunjang yaitu :

1. kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil,
2. pengelolaan pembudidayaan ikan kecil
- 3.,penyediaan sarana dan prasarana kelompok pembudidaya.;

Produksi Perikanan Budidaya jika dilihat dari produksi yang dihasilkan Tahun 2021 dengan target 421.225,41 dan realisasi 450.180,99 dengan capaian 106,9%.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk peningkatan pengembangan Perikanan Budidaya yaitu:

1. Kegiatan pembinaan kelompok pembudidaya melalui peningkatan SDM
2. Pemberian bantuan sarana dan prasarana kelompok pembudidaya dan Kelompok Nelayan
3. Adanya kemitraan dengan pihak BPN dalam hal sertifikat tanah pembudidaya dan Nelayan
4. Bantuan pemerintah pusat melalui kementerian Kelautan dan Perikanan juga bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sasaran 2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja urusan Kelautan dan Perikanan.

Indikator Persentase Capaian Program Perangkat Daerah

Defenisi .

Persentase capaian kinerja program urusan Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa realisasi kinerja yang dihasilkan masuk dalam kategori **tercapai atau berhasil**.

Pencapaian diatas telah melampaui target, namun masih terdapat kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penganggaran akibat karena adanya refocusing anggaran di tahun 2021

.Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada kegiatan yang akan dicapai, namun karena adanya realokasi anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan ada yang tidak maksimal.

Beberapa Upaya yang dilakukan Dinas Perikanan dalam rangka peningkatan dan pencapaian kinerja yaitu :

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi untuk mendukung program kegiatan yang telah diperjanjikan.
2. Dalam melaksanakan penganggaran yang berbasis kinerja diharapkan dapat menghasilkan outcome (hasil) yang terukur.

Adapun Penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja yaitu :

1. Masih kurangnya sumberdaya manusia (SDM) dibanding dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kab Bone.
2. Sarana dan prasarana perikanan masih terbatas sehingga pemanfaatan sumberdaya perikanan belum termanfaatkan secara optimal.

Solusi yang diambil adalah perlunya penambahan SDM yang berkualitas , sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang terlaksananya suatu kegiatan yang berkelanjutan dan peningkatan SDM ASN melalui bimtek dan pelatihan .

6. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Perikanan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan

dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perikanan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor, dan anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat / sedikit penggunaan sumber daya maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Perikanan dalam pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	Capaian %	
Meningkatnya Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (ton)	6	10,4	173	1.116.958.450	1.037.372.450	92,87	80,13
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	7	14,3	204	2.291.029.050	2.274.119.050	99,26	105
	Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan kelautan dan perikanan	Persentase Capaian Kinerja Program (Perangkat daerah (%))	100	100	100	5.610.526.679	5.340.857.579	95,19	6,81

Sumber Data . Olah Data dan Laporan Keuangan Dinas Perikanan tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran , maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan terdapat efesiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu :

1. Indikator pertumbuhan Produksi Perikanan tangkap dengan capaian kinerja 173 % dan capaian anggaran 92,87 % menunjukkan bahwa anggaran 1.037.372.346 dan efesiensi penggunaan sumber daya 80.13 %.
2. Indikator Pertumbuhan Produksi Perikanan budidaya
Capaian kinerja 204 % dan capaian anggaran 99,26 %, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 2.274.118.922 dan efesiensi penggunaan sumber daya 105 %.
3. Indikator persentase capaian kinerja Program Perangkat
Capaian Kinerja dengan target 100 % dan capaian anggaran 95,19% menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 269.669.082 dan efesiensi penggunaan sumber daya 6.81 %.

Tabel 3.7. Analisis program /Kegiatan yang menunjang Keberhasilan /kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indicator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak lanjut
Meningkatnya Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	10,4	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	52.580,73	54.770,537	104	
			Pemberdayaan Nelayan Kecil	Persentase Jumlah Nelayan Kecil yang diberdayakan dalam Daerah Kabupaten/ kota	100	233	233,3	
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang terlatih	30	30	100	
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang terbina dan terfasilitasi	250	250	100	
				Jumlah Nelayan yang terlatih/ dibina	6	14	233,3	
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	Jumlah Nelayan yang terfasilitasi dengan mitra	150	150	100	
			Penerbitan Tanda daftar Kapal perikanan berukuran samapi dengan 10 GT di wilayah sungai,danau, waduk ,rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daerah Kabupaten Kota	Persentase penerbitan tanda daftar kapal berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai,danau, waduk ,rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daerah Kabupaten Kota	100	41,67	41,67	Mengintensifkan kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran nelayan untuk mengurus legalitas usahanya, diperlukan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021

			Pelayanan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah dokumen Pelayanan penerbitan Tanda daftar kapal perikanan sampai dengan 10 GT	300	125	41,67	regulasi mengenai sanksi bagi yang tidak memiliki ijin berusaha
Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	14,34	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan budidaya	421.255,41	450.180,99	128		
		Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan kecil	Persentase Cakupan Pokdakan Pembudidaya Ikan yang diberdayakan	100	320	320		
		Pengembangan Kapasitas Pembudidaya ikan	Jumlah Pembudidaya ikan yang terlatih dan terfasilitasi	30	30	100		
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan kecil	Jumlah pokdakan yang memperoleh Pendampingan /Penguatan Kelembagaan	10	32	320		
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan Kemitraan Usaha	Jumlah Pembudidaya yang terfasilitasi dengan mitra	30	30	100		
		Penerbitan Ijin Usaha Perikanan dibidang Pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten kota	Persentase Penerbitan ijin usaha Perikanan dibidang Pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten kota	100	230	230		
		Pelayanan Penerbitan ijin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan usahanya lokasi dan atau manfaat negative dalam 1 daerah Kabupaten Kota yang menggunakan semi intensif dan intensif serta tidak menggunakan modal asing atau tenaga kerja asing	Jumlah Dokumen Pelayanan penerbitan izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya atau lokasi atau manfaat dampak negatifnya dalam daerah kabupaten kota yang menggunakan teknologi semi intensif dan intensif serta tidak menggunakan modal asing atau tenaga	2	4	200		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021

			kerja asing				
		Penerbitan tanda Daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah kabupaten/ kota	Persentase Penerbitan tanda Daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah kabupaten/ kota	100	100	100	
		Pelayanan penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah dokumen pelayanan penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	50	15	30	Mengintensifkan kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran nelayan untuk mengurus legalitas usahanya, diperlukan regulasi mengenai sanksi bagi yang tidak memiliki izin berusaha
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Cakupan Pembudidayaan Ikan Air Payau yang di berdayakan	100	302,47	302,47	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang diadakan	4	5	125	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Benih Ikan Air Tawar yang diproduksi	517.750	582.000	112,41	
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pokdakan yang memperoleh bantuan	20	28	140	
		Pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah pemantauan lokasi kesehatan ikan dan lingkungan perikanan	10	10	100	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	Persentase Capaian program Perangkat Daerah	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP Persentase Capaian Kinerja Program perangkat daerah	B 100	BB 100	100	
---	---	-----	---	--	--------------	---------------	-----	--

Sumber : Data Olah dan Laporan Keuangan Dinas Perikanan 2021

Berdasarkan Tabel 3.7 tentang Analisa program /kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran 1.1. Meningkatnya Produksi Perikanan

Indikator 1.1. Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap

Dengan target 6% telah berhasil tercapai dengan pertumbuhan produksi perikanan tangkap sebesar 10,4 % dengan capaian 173%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pengelolaan perikanan tangkap, yang didukung dengan kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ kota, Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Penerbitan ntanda daftar kapal perikanan ukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah kabupaten/ kota

Sasaran 1.2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dengan target 7 % telah berhasil, pertumbuhan sebesar 14,3 % dengan capaian 204%.Indikator ini dapat terlaksana melalui program pengelolaan Perikanan budidaya yang didukung oleh beberapa kegiatan yaitu kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil,kegiatan penerbitan ijin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 daerah Kabupaten Kota, kegiatan penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK) dalam 1 daerah Kabupaten Kota dan kegiatan

pengelolaan pembudidayaan ,namun masih terdapat indikator kinerja yang realisasinya tidak maksimal.

Sasaran 2.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator 2. 1. Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten kota dengan target 100% dan realisasi Capaian Kinerja 100%. Selain pencapaian perangkat daerah juga terlihat pada pencapaian **nilai Reviu SAKIP yang telah dilakukan oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bone 2020, Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bone diperoleh nilai sebesar 71,34% dengan ketegori peringkat BB (Sangat Baik),** namun untuk nilai evaluasi SAKIP Tahun 2021 belum dapat disajikan karena pelaksanaan Evaluasi SAKIP oleh APIP akan dilaksanakan Tahun 2022

B. UPAYA PERBAIKAN BERIKUTNYA

Berdasarkan hasil Evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas , ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya yaitu :

Sasaran 1.1. Meningkatnya Produksi Perikanan

1. Perlunya perubahan pola pikir nelayan atau kelompok nelayan dan pembudidaya dalam peningkatan SDM yang berkualitas.

2. Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana modern penangkapan dan pembudidaya ikan serta kemudahan akses usaha Penguatan kemitraan dan jaringan pasar koordinasi lintas sektor.
3. Penerapan CPIB dan cara penanganan ikan hasil tangkapan dan CBIB dan cara penangan hasil produksi budidaya.
4. Melakukan pembinaan dan meningkatkan keterampilan baik pembudidaya maupun kelompok nelayan.

Sasaran 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja urusan Kelautan dan Perikanan.

Upayah yang dilakukan untuk perbaikan kinerja kedepan yaitu ;

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah melalui pemenuhan layanan serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi perkantoran.
2. Memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi yang menjadi rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti sebagai pemenuhan nilai yg lebih baik

C.REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Dinas Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan yaitu pagu operasi sebesar Rp. **9.018.514.179** (**Sembilan Milyard Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah**) terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 4.730.039.498, Belanja barang jasa Rp. 4.288.474.681

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021

dengan realisasi sebesar Rp. **8.652.349.097** atau **95,94 %**
sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4
Sasaran 1.1 Meningkatnya Produksi Perikanan			
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.116.958.450	1.037.372.450	92,87
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.291.029.050	2.274.119.050	99,26
Sasaran 1.2 Akuntabilitas Kinerja Urusan kelautan dan Perikanan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten kota	5.610.526.679	5.340.857.597	95,19
Total	9.018.514.179	8.652.349.097	95,94

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum tentang Keberhasilan Capaian Kinerja

Sasaran Pembangunan Kelautan dan perikanan Kabupaten Bone diarahkan pada peningkatan Produksi Perikanan yang diharapkan mampu mendapat perubahan disegala bidang yang menuntut kerja keras dan kesungguhan stakeholder Perikanan untuk mengelolah sumberdaya secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas perikanan Kabupaten Bone merupakan pertanggung jawaban atas kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas perikanan, yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kab Bone.

Sasaran Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas perikanan Tahun 2021 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas perikanan tahun 2018-2023, disamping itu Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah sarana sebagai bahan Evaluasi dalam menunjang perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

Keberhasilan Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bone tahun 2021 melaksanakan **3 Program 12 Kegiatan dan 27 Kegiatan**

dengan pagu Anggaran **Rp.9.018.514.179** dan realisasi anggaran **Rp.8.652.349.097** atau **95,94%**.

4.2. Kendala Pelaksanaan

Dari Program kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran yang tertruang dalam RENSTRA Dinas Perikanan 2018-2023 menunjukkan bahwa Pencapaian sasaran berada pada kategori **Sangat Berhasil** dengan rata-rata pencapaian **159%**, namun pada pelaksanaan program kegiatan upaya mencapai sasaran terdapat beberapa kendala. Dalam penentuan isu strategis faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas perikanan Kab Bone yaitu:

1. Dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona di Indonesia;
2. Pengurangan belanja pada APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 sebagai tindak lanjut penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi
3. Produktivitas dan daya saing masih rendah
4. Masih lemahnya manajemen TPI sehingga kualitas produksi kurang
5. Kualitas Kelembagaan Nelayan pembudidaya dan pengolah serta kesenjangan Gender dalam kelembagaan Kelompok

Adapun lampiran laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dapat diakses melalui QR Code berikut:

LAMPIRAN



PERBUP IKU



PK 2021



PK 2022



TL TEMUAN APIP



RENJA 2021-2022



RENCANA AKSI 2021-2022

6. Sebagai
b besar
operasional
usaha
nelayan skala
kecil
bergantung
pada
penggawa
sawi

7. Masih
maraknya
kegiatan
illegal Fishing